DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

BA.018.03 BELANJA SEKTORAL
Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2015
AUDITED

JALAN AUP PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN 12520
JUNI 2016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juni 2016
Direktur Jenderal

Dr.Ir. Hasil Sembiring M.Sc
NIP 196002101988031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	25
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juni 2016
Direktur Jenderal

Dr.Ir. Hasil Sembiring M.Sc
NIP 196002101988031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.018.03 Belanja Sektoral Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 16.261.619.417 atau sebesar 421,38 % dari estimasi pendapatan yang terlaporkan pada laporan masuk sebesar Rp. 3.859.166.000.

Realisasi Belanja Negara (*netto*) pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.635.722.589.266 atau sebesar 91,45 % dari alokasi anggaran yang terlaporkan pada laporan masuk sebesar Rp 2.882.204.375.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 .

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp 467.280.766.681 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 33.375.689.856; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 431.596.708.856; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2.308.367.969.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 2.863.741.534 dan Ekuitas sebesar Rp 464.417.025.147

.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan kegiatan operasional; beban kegiatan operasional; Pendapatan dan beban kegiatan non operasional dalam tahun pelaporan dibndingkan tahun sebelumnya.

Laporan Operasional periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 : Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp 5.801.323.869; beban kegiatan operasional sebesar Rp. 2.674.802.590.011 serta Pendapatan dan beban kegiatan non operasional sebesar Rp. 10.576.282.762, sehingga terdapat Defisit pada Laporan Operasional sebesar Rp (2.660.983.428.144).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas awal per 01 Januari 2015 sebesar Rp 519.070.676.193; Defisit pada Laporan Operasional sebesar Rp (2.660.983.428.144); Penyesuaian nilai aset sebesar Rp. 8.412.682.278; Kumulatif perubahan kebijakan akuntansi (koreksi persediaan, aset tetap dan lain-lain) sebesar Rp. (12.619.839.842); Transaksi antar entitas sebesar Rp 2.610.536.934.662, sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp 464.417.025.147.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 Desember 2015 DAN 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-15		% thd Angg	31-Des-14
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.859.166.000	16.261.619.417	421,38	27.681.059.899
JUMLAH PENDAPATAN		**3.859.166.000**	**16.261.619.417**	**421,38**	**27.681.059.899**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	52.697.755.000	44.267.236.536	84,00	41.528.653.359
Belanja Barang	B.4	564.248.377.000	443.443.835.387	78,59	411.332.992.873
Belanja Bantuan Sosial	B.5	2.254.666.804.000	2.138.664.355.058	94,86	1.550.535.433.964
Jumlah Belanja Operasi		2.871.612.936.000	2.626.375.426.981	91,46	2.003.397.080.196
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	8.171.952.000	7.151.136.785	87,51	2.963.397.950
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	1.698.537.000	1.676.786.500	98,72	129.286.850
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	189.000.000	186.814.000	98,84	190.036.200
Belanja Modal Lainnya	B.10	531.950.000	332.425.000	62,49	-
Jumlah Belanja Modal		10.591.439.000	9.347.162.285	88,25	3.282.721.000
JUMLAH BELANJA		**2.882.204.375.000**	**2.635.722.589.266**	**91,45**	**2.006.679.801.196**

Jakarta, Juni 2016
Direktur Jenderal

Dr.Ir. Hasil Sembiring M.Sc
NIP 196002101988031001

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2.634.347.711	597.385.175
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	20.331.873	233.227
Piutang PNBP	C.4	55.956.214	27.684.036
Penyisihan Piutang PNBP	C.4.1	(1.374.177)	(1.441.820)
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	3.895.559.344	4.048.963.586
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	C.7	(3.895.559.344)	(3.970.541.977)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	30.666.428.235	44.691.428.061
Jumlah Aset Lancar		33.375.689.856	45.393.710.288
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	204.351.078.044	210.545.023.329
Peralatan dan Mesin	C.14	479.433.022.958	476.606.133.715
Gedung dan Bangunan	C.15	93.562.173.424	89.836.515.524
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	23.894.794.346	24.854.568.022
Aset Tetap Lainnya	C.17	3.876.795.324	3.874.995.324
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	-	1.934.577.600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(373.521.155.240)	(334.918.846.373)
Jumlah Aset Tetap		431.596.708.856	472.732.967.141
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	1.217.530.216	903.579.269
Aset Lain-Lain	C.21	62.716.030.432	59.961.289.675
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(61.625.192.679)	(59.136.962.023)
Jumlah Aset Lainnya		2.308.367.969	1.727.906.921
JUMLAH ASET		**467.280.766.681**	**519.854.584.350**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	2.634.347.711	597.385.175
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	223.104.109	186.522.982
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	6.289.714	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.863.741.534	783.908.157
JUMLAH KEWAJIBAN		2.863.741.534	783.908.157
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	464.417.025.147	519.070.676.193
JUMLAH EKUITAS		464.417.025.147	519.070.676.193
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**467.280.766.681**	**519.854.584.350**

Jakarta, Juni 2015
Direktur Jenderal

Dr.Ir. Hasil Sembiring M.Sc
NIP 196002101988031001

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.801.323.869	-
JUMLAH PENDAPATAN		**5.801.323.869**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	44.267.236.536	-
Beban Persediaan	D.3	33.551.406.898	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	185.043.901.895	-
Beban Pemeliharaan	D.5	8.255.918.285	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	229.457.852.728	-
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	24.706.914.946	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	2.107.489.106.253	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	42.023.635.850	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	6.616.620	-
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		**2.674.802.590.011**	**-**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.669.001.266.142)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.017.837.998	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8.017.837.998	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.660.983.428.144)	-
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(2.660.983.428.144)**	**-**

Jakarta, Juni 2015
Direktur Jenderal

Dr.Ir. Hasil Sembiring M.Sc
NIP 196002101988031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	519.070.676.193	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.660.983.428.144)	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	8.412.682.278	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	(4.681.414.344)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.5	(7.970.171.253)	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.6	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7		
LAIN-LAIN	E.8	31.745.755	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2.610.536.934.662	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.9	(54.653.651.046)	-
EKUITAS AKHIR	E.10	**464.417.025.147**	**519.070.676.193**

Jakarta, Juni 2015
Direktur Jenderal

Dr.Ir. Hasil Sembiring M.Sc
NIP 196002101988031001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 mengelola dana APBN sebesar Rp. 2.882.204.375.000 dikelola oleh 256 satuan kerja Kantor Pusat (KP); Kantor Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), adapun profil dan kebijakan teknis sebagai berikut.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai keberlanjutan dari RPJM ke-2 (2010-2014), maka RPJM ke-3 (2015–2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Sesuai dengan misi dari RPJM ke-3 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh, maka pembangunan nasional diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 10 prioritas nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, (2) Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, (3) Ekonomi, (4) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (5) Bidang Politik, (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan, (7) Bidang Hukum dan Aparatur, (8) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, (9) Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan (10) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dari 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional Nawa Cita, agenda 7 (tujuh) yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, merupakan agenda yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian pada sub agenda pertama dari 7 (tujuh) sub agenda prioritas, yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (a) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (b) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (c) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 untuk sub sektor tanaman pangan adalah: Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat

dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri:

   a. Secara bertahap mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan pengendalian konversi salah satunya melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani. Perluasan sawah baru seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa;

   b. Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung peningkatan produksi padi;

   c. Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru; (ii) revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan penentuan sasaran dukungan/subsidi produksi padi; (iii) revitalisasi sistem perbenihan nasional dan daerah yang melibatkan lembaga Litbang, produsen benih serta balai benih dan masyarakat penangkar termasuk pengembangan 1.000 desa berdaulat benih; (iv) Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga;

   d. Pengembangan produksi pangan oleh swasta dan korporasi terutama BUMN pangan;

   e. Peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan pascapanen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil.

   f. Perlindungan kepada petani yang mengalami kegagalan panen melalui asuransi pertanian sehingga petani dapat kembali melanjutkan kegiatan produksi pertanian dalam rangka menuju tercapainya target produksi nasional.

2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya, antara lain dengan melakukan:

   a. Peningkatan produksi tanaman pangan lainnya, berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan luas tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa dan Bali dan produktivitas tanaman pangan terutama jagung dan kedelai;

   b. Penciptaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan terutama melalui kerjasama antara swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi;

   c. Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*, dan pasar tradisional serta terhubung dengan tol laut;

   d. Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, dan penggunaan pupuk organik.

3. Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui:

   a. Pembangunan jaringan irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa dan peningkatan fungsi jaringan irigasi, yang mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural;

   b. Rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi rusak dan 50 bendungan terutama pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat;

   c. Optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

   d. Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi;

   e. Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem *out-contracting*;

f. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification* (SRI), penggunaan kembali air buangan dari sawah (*water re-use*), dan pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*);

g. Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah; dan

h. Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Visi

Sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan, dan dengan mempertimbangkan permasalahan, tantangan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 - 2019, adalah:

”Terwujudnya pemenuhan kebutuhan yang cukup secara berkelanjutan dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional”.

Selama tahun 2015-2019, terdapat 4 (empat) komoditi yang harus ditingkatkan produksinya yaitu padi dalam rangka swasembada, jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe, serta ubi kayu sebagai penyedia bahan baku bio-industri.

Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan melalui pengembangan kawasan-kawasan yang terpadu.
2. Mengembangkan bioindustri komoditi yang memiliki nilai tambah strategis terutama dalam mendukung ketersediaan energi nasional
3. Meningkatkan kualitas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Tujuan

Berkaitan dengan implementasi visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan tujuan “Meningkatkan kapasitas dan mutu produksi tanaman pangan berbasis sumber daya lokal.”

Sasaran Strategis

Selama periode tahun 2015-2019, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 sasaran strategis, yaitu:

1. Peningkatan ketahanan pangan

2. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor

3. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi

4. Peningkatan kesejahteraan petani

Turunan dari sasaran strategis Kementerian Pertanian “Swasembada padi, jagung dan kedelai”, adalah merupakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama tahun 2015-2019 yaitu:

(1) Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai;

(2) Peningkatan Produksi Substitusi Pangan Impor (Ubikayu dan Kacang Tanah); dan

(3) Peningkatan Produksi Bahan Baku Energi;

Strategi dari sasaran strategis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini adalah:

1. Peningkatan Produktivitas;

2. Peningkatan Areal Tanam.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang secara langsung maupun tidak langsung melayani masyarakat, baik individu maupun dunia usaha (instansi/lembaga).

Ketiga UPT tersebut adalah :

1. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT);
2. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortkultura (BBPPMBTPH); dan
3. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT).

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pertanian pada UPT lingkup Ditjen Tanaman Pangan maka dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala setiap tahun.

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil pengukuran IKM pada tiga UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, secara keseluruhan Ditjen Tanaman Pangan memperoleh kategori kinerja **sangat baik**, dengan nilai IKM rata-rata sebesar 3,31 atau mencapai 82,86 dengan nilai mutu pelayanan memperoleh nilai **A**.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.018.03 adalah 256 satuan kerja. Upaya konsolidasi laporan keuangan seluruh satker (Pusat, KD,DK,TP) secara maksimal telah dilakukan melalui workshop penyusunan laporan keuangan wilayah, laporan yang terkumpul sebanyak 256 satker (100 %). Rincian penyampaian laporan satker terdapat di tabel. 3 sebagai berikut.

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Satker, DIPA dan Penyampaian Laporan			
			Satker	DIPA	Peny.Lap	blm Peny.Lap. SAIBA

					.SAIBA	
1	018.03	Kantor Pusat	1	1	1	0
2	018.03	Kantor Daerah	2	2	2	0
3	018.03	Dekonsentrasi	34	34	34	0
4	018.03	T.Pembantuan	219	219	219	0
Jumlah			**256**	**256**	256	0

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai entitas pelaporan, disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan dari Jasa Uji Laboratorium pada Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSBTPH)
  - Pendapatan dari pengembalian belanja Bantuan Sosial TA.2014

- Pendapatan dari setoran hasil LHP yang harus segera disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan dari Jasa Giro Dana Pengelolaan Rekening Satker

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan pada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional

dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp 16.261,619.417

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 16.261.619.417 atau mencapai 421,38 persen dari estimasi pendapatan yang terlaporkan sebesar Rp 3.859.166.000. Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Des-15		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengelolaan BMN	1.783.620.000	2.868.447.662	160,82
Pendapatan Jasa	2.075.546.000	2.803.405.971	135,07
Pendpt.Penerimaan Kembali TAY	-	10.141.897.672	
Pendapatan Lain-lain	-	447.868.112	
Jumlah	**3.859.166.000**	**16.261.619.417**	421,38

Realisasi pendapatan berakhir 31 Desember 2015 berbanding dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

URAIAN	Real. 31 Des 2015	Real. 31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengelolaan BMN	2.868.447.662	3.332.543.309	-13,93
Pendapatan Jasa	2.803.405.971	2.426.090.385	15,55
Pendpt.Penerimaan Kembali TAY	10.141.897.672	20.738.325.688	-51,10
Pendapatan Lain-lain	447.868.112	1.184.100.517	-62,18
Jumlah	**16.261.619.417**	**27.681.059.899**	**-41,25**

B.2. BELANJA

Realisasi anggaran tahun 2015 per tanggal pelaporan mencapai Rp. 2,63 triliun atau 91,45 % dari pagu 2,88 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding realisasi anggaran tahun 2014 yang hanya 88,27 %.

Prestasi tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi perbaikan dalam pengelolaan dan percepatan serapan anggaran, sehingga anggaran yang disediakan dalam DIPA dapat terealisasi lebih tinggi. Serapan anggaran tersebut secara tidak langsung mencerminkan keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor pendukung tercapainya serapan anggaran antara lain disebabkan oleh peningkatan asistensi, pendampingan, dan pengawalan yang dilakukan oleh pusat dan provinsi dan juga termasuk pengawalan dari Itjen, BPKP dan penegak hukum kepada para pelaksana di tingkat kabupaten dan lapangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 antara lain kondisi iklim kekeringan akibat El-Nino, sulitnya memperoleh lahan yang siap digunakan untuk perluasan areal tanam, belum optimalnya penerapan teknologi budidaya sesuai anjuran dan spesifik lokasi, belum optimalnya sistem perbenihan khususnya benih kedelai, keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan dan pemasaran, belum adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta jaminan pemasaran yang memadai khususnya untuk kedelai dan jagung.

Upaya tindaklanjut atas permasalahan tersebut antara lain : penyebarluasan perbaikan teknologi budidaya dan efisiensi pemanfaatan air, pemberdayaan penangkar benih dan penumbuhan desa mandiri benih, perbaikan jaringan irigasi tersier, bantuan alsin prapanen dan pascapanen, pompa air, gerakan penanganan dampak kekeringan oleh petugas pertanian bekerjasama dengan TNI/Babinsa, koordinasi intansi terkait; melakukan percepatan pengelohan tanah dan tanaman segera setelah panen untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke depan akan melakukan upaya perbaikan antara lain : perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan, pemilihan lokasi kegiatan, organisasi pelaksanaan, serta peningkatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian secara berkesinambungan, serta peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.
Upaya peningkatan produksi akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan peningkatan mutu dan efesiensi tani, agar produksi meningkat, juga dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan petani.

Realisasi Belanja Rp 2.635.722.589.266

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.635.722.589.266 atau 91,45 % dari anggaran belanja yang terlaporkan sebesar Rp 2.882.204.375.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2015

URAIAN	31-Des-15		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	52.697.755.000	44.290.614.350	84,05
Belanja Barang	564.248.377.000	443.837.866.467	78,66
Belanja Bantuan Sosial	2.254.666.804.000	2.175.379.550.549	96,48
Belanja Modal	10.591.439.000	9.347.162.285	88,25
Total Belanja Kotor	**2.882.204.375.000**	**2.672.855.193.651**	92,74
Pengembalian Belanja		(37.132.604.385)	**0**
Total Belanja	**2.882.204.375.000**	**2.635.722.589.266**	**91,45**

Realisasi anggaran per jenis belanja menunjukkan jenis belanja bansos berkontribusi (96,48%), hal ini menunjukkan bahwa APBN Ditjen Tanaman Pangan tahun 2015 sebagian besar telah tersalurkan kepada kelompok tani dan penerima manfaat.

Untuk belanja pegawai, barang dan modal, capaiannya lebih rendah disebabkan adanya penghematan/efisiensi anggaran, serta ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

Realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31-Des-15		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	957.553.205.000	855.765.496.835	89,37
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1.344.064.929.000	1.312.337.552.647	97,64
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	95.142.546.000	85.948.158.073	90,34
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	103.998.736.000	97.704.774.489	93,95
Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	78.498.554.000	61.327.269.675	78,13
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	282.239.307.000	202.498.980.040	71,75
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	7.522.818.000	7.449.743.917	99,03
Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	13.184.280.000	12.690.613.590	96,26
Total Belanja	**2.882.204.375.000**	**2.635.722.589.266**	91,45

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015

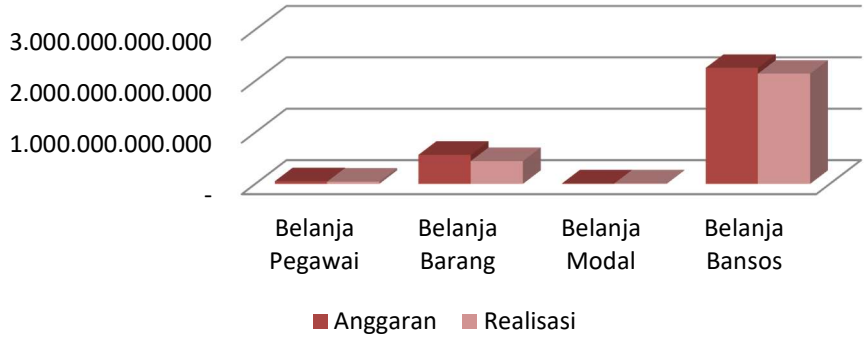

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan menunjukkan untuk kegiatan serealia yang didalamnya mencakup kegiatan pengembangan padi dan jagung menunjukkan kinerja yang cukup tinggi (97,64%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya (71,75%). Disebabkan oleh upaya efisiensi/penghematan belanja pemerintah, seperti penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat/koordinasi di luar kantor, penghematan belanja barang dan modal melalui lelang/kontraktual, serta adanya beberpa pos anggaran yang tidak terserap seperti : pembinaan Upsus PJK, belanja transito (cadangan belanja pegawai) dan uang lembur.

Realisasi kegiatan terendah berikutnya ada pada kegiatan Pengelolaan Aneka Kacang dan Umbi (89,37%), disebabkan beberapa kegiatan GPPTT dan PAT PIP kedelai yang sebagian tidak terlaksana akibat kesulitan mencari lahan, tumpang tindih dengan kegiatan lahan, serat akibat dampak el-nino yang mengakibatkan kemarau pajang (Juli-November 2015) sehingga terjadi mundurnya jadwal tanam.

Sementara itu pada kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan (78,13%) disebabkan sebagian pengadaan alsin tidak terlaksana karena bangunan untuk penempatan alsin (flat bed dryer, vertical dryer, RMU) belum siap, keterbatasan waktu pelaksanaan terutama untuk kegiatan APBN-P yang revisinya baru terbit menjelang akhir tahun anggaran 2015 (Oktober 2015), serta efisiensi/penghematan dari pengadaan kontraktual/lelang.

Realisasi posisi 31 Desember 2015 berbanding dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

URAIAN	Real. 31 Des 2015	Real. 31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	44.267.236.536	41.528.653.359	6,59
Belanja Barang	443.443.835.387	441.745.493.915	0,38
Belanja Bantuan Sosial	2.138.664.355.058	1.550.535.433.964	37,93
Belanja Modal	9.347.162.285	3.282.721.000	184,74
Jumlah	**2.635.722.589.266**	**2.037.092.302.238**	**29,39**

Belanja Pegawai Rp44.267.236.536

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 44.267.236.536 dan Rp. 41.528.653.359 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Real. 31 Des 2015	Real. 31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	31.406.664.650	29.662.452.660	5,88
Beban Pembulatan Gaji	824.229	580.885	41,89
Beban Tunj.Suami/Istri	2.356.510.438	2.216.339.582	6,32
Beban Tunj.Anak	681.294.248	643.676.590	5,84
Beban Tunj.Struktural	1.237.850.000	1.287.400.000	(3,85)
Beban Tunj.Fungsional	930.915.000	862.380.000	7,95
Beban Tunj.PPh	788.287.505	682.058.680	15,57
Beban Tunj.Beras	1.965.345.780	1.862.229.640	5,54
Beban Uang Makan	3.626.835.000	3.082.409.000	17,66
Beban Tunj.Lain-Lain	25.852.500	-	-
Beban Tunj.Umum	1.270.235.000	1.288.810.000	(1,44)
Jumlah Belanja Kotor	**44.290.614.350**	**41.588.337.037**	**6,50**
Pengembalian Beban Pegawai	(23.377.814)	(59.683.678)	
Jumlah Belanja	**44.267.236.536**	**41.528.653.359**	**6,59**

Pagu dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 terdapat pada Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah (BBPOPT dan BBPPMBTPH)

Belanja Barang Rp 443.443.835.387

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 443.443.835.387 dan Rp 411.332.992.873 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Real. 31 Des 2015	Real. 31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	26.318.230.225	23.198.371.028	13,45
Belanja Barang Non Operasional	140.136.863.092	136.336.812.096	2,79
Belanja Barang Persediaan	9.453.797.695	-	-
Belanja Jasa	19.314.475.811	15.693.271.449	23,07
Belanja Pemeliharaan	7.899.252.834	6.799.192.722	16,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	229.619.048.348	225.511.426.875	1,82
Belanja Perjalanan luar Negeri	129.510.260	262.236.933	(50,61)
Belanja Brg diserahkan ke Masy/Pemda	2.109.498.545	980.984.025	115,04
Belanja Brg Penunjang DK TP diserahkan ke Pen	8.823.429.657	1.467.462.052	501,27
Belanja Brg Lainnya diserahkan ke Masy/Pemda	33.760.000	1.197.961.625	(97,18)
Jumlah Belanja Kotor	**443.837.866.467**	**411.447.718.805**	**7,87**
Pengembalian Belanja Barang	(394.031.080)	(114.725.932)	
Jumlah Belanja	**443.443.835.387**	**411.332.992.873**	**7,81**

Realisasi belanja berupa barang persediaan (akun.521811) tahun 2015 sebesar Rp. 9.453.797.695.

Untuk realisasi barang peralatan mesin, barang fisik dan barang penunjang yang bertujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tahun 2015 sebesar Rp. 10.966.688.202, rincian sebagai berikut :

Akun	Nama Perkiraan	Pagu	Realisasi
526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	Rp 1.517.685.000	Rp 1.089.018.320
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	Rp 1.098.635.000	Rp 1.020.480.225
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan ke Pemerintah Daerah	Rp 3.070.050.000	Rp 2.973.796.650
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan ke Pemerintah Daerah	Rp 7.912.706.000	Rp 5.849.633.007
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke masyarakat/pemda	Rp 34.000.000	Rp 33.760.000
Nilai		Rp 13.633.076.000	Rp 10.966.688.202

Belanja Bantuan Sosial Rp 2.138.664.355.058

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 2.138.664.355.058 dan Rp 1.550.535.433.964, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN JENIS BELANJA	Real. 31 Des 2015	Real. 31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Bansos dlm Bentuk Uang	2.134.281.898.994	1.455.013.198.715	46,68
Belanja Bansos dlm Bentuk Barang/Jasa	41.097.651.555	113.258.900.375	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.175.379.550.549	1.568.272.099.090	38,71
Pengembalian Belanja Bansos	(36.715.195.491)	(17.736.665.126)	
Jumlah	**2.138.664.355.058**	**1.550.535.433.964**	37,93

Pagu dan realisasi belanja sosial tahun anggaran 2015 terdapat pada satuan kerja Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuaan (TP).

Bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan produktivitas, luas panen dan produksi padi tahun 2015, diantaranya : perbaikan penerapan pengelolaan teknologi budidaya akibat bantuan saprodi paket lengkap (bantuan benih, pupuk dan pestisida), peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat, perbaikan jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, pengingkatan perlindungan tanaman dari ganguan OPT dan DPI, perbaikan pascapanen, pengingkatan penyuluhan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas pertanian bekerjasama dengan TNI/Babinsa dalam program UPSUS.

Dalam rangka mendukung penurunan susut hasil, dialokasikan bantuan sarana pascapanen padi melalui dana APBN Ditjen PSP berupa : combine harvester dan besar, vertical dryer beserta bangunan serta flat bed dryer yang diharapkan dapat menurunkan susut hasil padi.

Belanja Modal Rp.9.347.162.285

B.6 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 9.347.162.285 dan Rp 3.282.721.000. Pagu dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2015 terdapat pada satuan kerja Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD), dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN JENIS BELANJA	Real. 31 Des 2015	Real. 31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Peralatan dan Mesin	7.151.136.785	2.963.397.950	141,32
Belanja Gedung dan Bangunan	1.676.786.500	129.286.850	1.196,95
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.814.000	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	332.425.000	190.036.200	74,93
Jumlah Belanja Kotor	9.347.162.285	3.282.721.000	184,74
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah	**9.347.162.285**	**3.282.721.000**	184,74

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2.634.347.711

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 2.634.347.711 dan Rp 597.385.175 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja yang berasal dari sisa UP/TUP per tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara, sebagai berikut:

No	Kode Satker	KW	Uraian Satker	31-Des-15			31-Des-14
				Nilai	Bendahara/ Bank	Bln disetorkan	
2	109065	DK	Diperta.Prov. Jambi	Rp -	terkoreksi		Rp 48.721.000
3	109110	TP	Diperta.Prov. Jambi	Rp -			Rp 38.792.800
4	129092	TP	Diperta.Kab. Mesuji	Rp -	inaktif	Jan 2015	Rp 2.560.000
7	189080	DK	Diperta.Prov. Sulteng	Rp -			Rp 2.387.400
8	249099	DK	Diperta.Prov. NTT	Rp -			Rp 417.928.025
9	249158	TP	Diperta.Prov. NTT	Rp -			Rp 34.485.950
10	253508	TP	Diperta.Kab. Intan Jaya	Rp -	inaktif	Jan 2015	Rp 2.510.000
11	299380	DK	Diperta.Prov. Banten	Rp -			Rp 50.000.000
12	238251	KP	Kantor Pusat	Rp 354.711	Bendahara	Jan 2016	Rp -
13	099281	TP	Diperta.Kab.Pelelawan	Rp 20.810.200	Bendahara		Rp -
14	179103	TP	Diperta.Prov.Sulut	Rp 2.450.000	Bendahara	Jan 2016	Rp -
15	209248	TP	Diperta.Kab.Buton Utara	Rp 5.983.000	Bendahara		Rp -
16	219090	TP	Diperta.Prov.Maluku	Rp -	Bendahara	Des 2015	Rp -
17	239082	TP	Diperta.Lombok Tengah	Rp 18.180.000	Bendahara		Rp -
18	249099	DK	Diperta.Prov.NTT	Rp 2.298.276.000	Bendahara	Jan 2016	Rp -
19	249158	TP	Diperta.Prov.NTT	Rp 238.941.300	Bendahara	Jan 2016	Rp -
20	309147	DK	Diperta.Prov.Babel	Rp 28.752.500	Bendahara		Rp -
21	339070	TP	Diperta.Kab.Kaimana	Rp 20.000.000	Bendahara	jan 2016	Rp -
22	339183	TP	Diperta.Kab.Sorong	Rp 600.000	Bendahara		Rp -
Jumlah				**Rp 2.634.347.711**			**Rp 597.385.175**

Bukti setor SSBP terampir

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0 (nihil)

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar masing - masing Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 20.331.873

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 20.331.873 dan Rp 233.227.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo

rekening di bank maupun uang tunai. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Jasa Giro dan Pajak PPh dan PPN yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca sebagai berikut:

No	Kode Satker	KW	Uraian Satker	31 Des 2015	Bln disetorkan	31 Des 2014
2	089101	TP	Diperta. Kab. Dharmasraya	Rp -		Rp 20.275
3	119090	TP	Diperta. Kab. Musi Rawas	Rp -		Rp 1.000
4	149092	TP	Diperta. Kab. Pulang Pisau	Rp -		Rp 20.383
5	219071	TP	Diperta. Kab. Seram Bag. Brt	Rp -		Rp 15.244
6	219090	TP	Diperta. Prov. Maluku	Rp -		Rp 21
7	249127	TP	Diperta. Kab. Rotendao	Rp -		Rp 6.325
8	289078	TP	Diperta. Kab. Halhamera Sel.	Rp -		Rp 169.479
9	340309	TP	Diperta. Kab. Mamuju Utara	Rp 500		Rp 500
10	179066	DK	Diperta. Prov. Sulut	Rp 6.289.714	Jan 2016	Rp -
11	249100	TP	Diperta. Kab. Kupang	Rp 659		Rp -
12	339070	TP	Diperta. Kab. Kaimana	Rp 14.041.000	Jan 2016	Rp -
Jumlah				**Rp 20.331.873**		**Rp 233.227**

Piutang PNBP Rp 55.956.214

C.4. Piutang PNBP

Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 55.956.214 dan Rp 27.684.036, per tanggal neraca sebagai berikut:

Kode Satker	KW	Uraian Satker	31-Des-15	31 Des 2014
109083	TP	Diperta Kab.Bungo	Rp 11.520.000	Rp 13.720.000
238251	KP	Kantor Pusat	Rp 8.902.888	Rp 13.964.036
239071	DK	Diperta Prov.NTB	Rp 35.533.326	Rp -
Jumlah			**Rp 55.956.214**	**Rp 27.684.036**

Piutang PNBP di atas merupakan : hasil pemeriksaan BPKP pada Dinas Pertanian Kabupaten Bungo provinsi jambi; piutang angsuran rumah dinas pada hasil pemeriksaan BPK-RI satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan; piutang PNBP pada kegiatan BPSBTPH pada Dinas Pertanian Provinsi NTB

Penyisihan Piutang PNBP Rp. (1.374.177)

C.4.1 Penyisihan Piutang PNBP

Nilai Penyisihan Piutang PNBP per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp (1.374.177) dan Rp (1.441.820).

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur, per tanggal neraca sebagai berikut:

Kd.satker	KW	Uraian Satker	31-Des-15	Kualitas	Penyisihan
109083	TP	Diperta Kab.Bungo	Rp 11.520.000	10%	Rp 1.152.000
238251	KP	Kantor Pusat	Rp 8.902.888	0.05%	Rp 44.510
239071	DK	Diperta Prov. NTB	Rp 35.533.326	0.05%	Rp 177.667
Jumlah			Rp 55.956.214		Rp 1.374.177

Ket : 10% = kurang lancar; 0.05% = Lancar

Bagian Lancar TP/TGR Rp 3.895.559.344

C.5. Bagian Lancar TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 3.895.559.344 dan Rp 4.048.963.586. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Kd.satker	KW	Uraian Satker	31-Des-15
238251	KP	Dtjen TP	Rp 3.102.806.976
099281	TP	Diperta.Kab.Pelelawan	Rp 1.870.000
129075	TP	Diperta.Kab.Lampung Sel.	Rp 129.517.900
219055	DK	Diperta.Prov.Maluku	Rp 236.863.318
299336	DK	Diperta.Prov.Banten	Rp 234.900.000
319063	TP	Diperta.Kab.Gorontalo	Rp 76.952.500
319171	TP	Diperta.Kab.Pohuwato	Rp 75.599.250
319088	TP	Diperta.Prov.Gorontalo	Rp 37.049.400
Jumlah			Rp 3.895.559.344

Bagian Lancar TPA Rp 0 (nihil)

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR Rp (3.895.559.344)

C.7. Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp (3.895.559.344) dan Rp (3.970.541.977).

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek (bagian lancar TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan sebagai berikut:

Kd.satker	KW	Uraian Satker	31-Des-15	Kualitas	Penyisihan
238251	KP	Dtjen TP	Rp 3.102.806.976	100%	Rp 3.102.806.976
099281	TP	Diperta.Kab.Pelelawan	Rp 1.870.000	100%	Rp 1.870.000
129075	TP	Diperta.Kab.Lampung Sel.	Rp 129.517.900	100%	Rp 129.517.900
219055	DK	Diperta.Prov.Maluku	Rp 236.863.318	100%	Rp 236.863.318
299336	DK	Diperta.Prov.Banten	Rp 234.900.000	100%	Rp 234.900.000
319063	TP	Diperta.Kab.Gorontalo	Rp 76.952.500	100%	Rp 76.952.500
319171	TP	Diperta.Kab.Pohuwato	Rp 75.599.250	100%	Rp 75.599.250
319088	TP	Diperta.Prov.Gorontalo	Rp 37.049.400	100%	Rp 37.049.400
Jumlah			Rp 3.895.559.344		Rp 3.895.559.344

Ket : 100% = Macet

Belanja Dibayar di Muka Rp 0 (nihil)

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Persediaan Rp 30.666.428.235

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 30.666.428.235 dan Rp 44.691.428.061.

Persediaan Ditjen Tanaman Pangan merupakan persediaan penunjang tupoksi dan persediaan yang bertujuan akan diserahkan ke Masyarakat/Pemda (Persediaan 526). Telah dilakukan stock opname untuk seluruh persediaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31-Des-15	31-Des-14
	Penunjang TUPOKSI DITJEN		
1	Barang Konsumsi	Rp 1.104.741.254	Rp 664.406.510
2	Barang Untuk Pemeliharaan	Rp 67.664.505	Rp 47.558.000
3	Suku Cadang	Rp 285.513.250	Rp 357.468.044
4	Pita Cukai, Materai dan Legas	Rp -	Rp 11.000
5	Bahan Baku	Rp 13.029.679.211	Rp 23.071.161.823
6	Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	Rp 183.187.030	Rp 183.187.030
7	Persediaan Lainnya	Rp 265.048.115	Rp 812.508.156
	Jumlah	***Rp 14.935.833.365***	***Rp 25.136.300.563***
	Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		
1	Tanah Bangunan	Rp 4.902.457.500	Rp 2.714.288.900
2	Hewan dan Tanaman	Rp 1.328.722.000	Rp 1.570.349.000
3	Peralatan dan Mesin	Rp 6.849.872.470	Rp 5.266.110.860
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 340.044.000	Rp 340.044.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 637.182.000	Rp 231.520.000
5	Aset Lain-Lain	Rp 135.751.000	Rp 159.890.000
7	Persediaan dlm rangka Bansos	Rp 558.706.600	
8	Persediaan Lainnya	Rp 977.859.300	Rp 9.272.924.738
	Jumlah	***Rp 15.730.594.870***	***Rp 19.555.127.498***
Jumlah Persediaan		***Rp 30.666.428.235***	***Rp 44.691.428.061***

Persediaan dalam rangka bansos di atas sebesar Rp. 558.706.600 merupakan bansos barang yang bertujuan diserahkan ke kelompok tani, pertanggal pelaporan masih terdapat bansos barang yang belum diserahkan kepada kelompok tani (belum ada BAST) yaitu pada Dinas Pertanian Provinsi Jambi sebesar Rp. 103.449.200 (DK) ; Rp. 455.257.400 (TP).

Persediaan diserahkan ke Masyarakat/Pemda di atas merupakan realisasi belanja 526 dan barang hibah Koica pertanggal pelaporan belum diserahkan pada Masyarakat/Pemda (hasil pemeriksaan APIP pada bulan April 2016), masih tercatat pada persediaan Kantor Pusat berupa Tanah Bangunan sebesar Rp. 1.729.086.000; Hewan dan Tanaman sebesar 1.327.492.000; Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.217.432.110; Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 340.044.000; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.560.000 dan Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp. 298.654.400.

Tagihan TP/TGR Rp 0 (nihi)

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Per tanggal pelaporan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

TPA Rp 0 (nihil)

C.11. Tagihan Penjualan Angsuran

Per tanggal pelaporan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp 0 (nihil)

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Per tanggal pelaporan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihi) dan Rp 0 (nihil).

Tanah Rp 204.351.078.044

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 204.3511.078.044 dan Rp 210.545.023.329. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	**Rp**	**210.545.023.329**
Koreksi Pencatatan	Rp	(3.658.479.000)
Transfer Keluar	Rp	(651.969.500)
Penghapusan	Rp	(1.883.496.785)
Saldo per 31 Des 2015	**Rp**	**204.351.078.044**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Des 2015	**Rp**	**204.351.078.044**

Aset tanah yang berlokasi di pusat sebagai berikut :

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	364,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	145.600.000,00
2.	371,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	148.400.000,00
3.	263,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	105.200.000,00
4.	262,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	104.800.000,00
5.	248,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	99.200.000,00
6.	230,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	92.000.000,00
7.	214,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	85.600.000,00
8.	120,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	48.000.000,00
9.	122,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	48.800.000,00
10.	120,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	48.000.000,00
11.	119,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	47.600.000,00
12.	114,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 /13, Pancoran Mas	45.600.000,00
13.	117,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 /13, Pancoran Mas	46.800.000,00
14.	120,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	48.000.000,00
15.	161,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	64.400.000,00
16.	139,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	55.600.000,00
17.	155,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 /13, Pancoran Mas	62.000.000,00
18.	137,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	54.800.000,00
19.	121,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	48.400.000,00
20.	118,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	47.200.000,00
21.	120,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 /13, Pancoran Mas	48.000.000,00
22.	121,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	48.400.000,00
23.	112,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	44.800.000,00

24.	126,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02 / 13, Pancoran Mas	50.400.000,00
25.	2.106,00m2	Mampang Indah Dua Rt.02/13, Pancoran Mas	842.400.000,00
26.	983,00m2	Raya Rawa Bambu no.13B Rt.013 / 05, Pasar Minggu	2.342.400.000,00
27.	5.181,00m2	AUP Rt.0/0, Pasar Minggu	12.371.875.692,00
28.	8.062,00m2	Jl. AUP Rt.0 /0, Pasar Minggu	19.187.560.000,00
29.	5.909,00m2	Raya Ragunan No. 15 Rt.012 / 05, Pasar Minggu	14.946.431.415,00
30.	4.336,00m2	Taman Marga Satwa Ragunan Rt.12 / 05, Pasar Minggu	43.442.384.000,00
31.	5.008,00m2	AUP No.3 Rt.0/0, Pasar Minggu	11.958.763.456,00
32.	1.319,00m2	Pertanian III . No.33 Rt.014 / 05, Pasar Minggu	3.107.000.000,00
33.	2.680,00m2	Pertanian III Rt.14 / 05, Pasar Minggu	6.271.200.000,00
34.	59.770,00m2	0 /0 Rt.0 / 0, Cibitung	7.770.100.000,00
35.	25.565,00m2	0 Rt.0, Cikarang	3.323.450.000,00
36.	66.625,00m2	0 Rt.0, Lemahabang	8.661.250.000,00
37.	53.630,00m2	0 Rt.0, Pebayuran	6.971.900.000,00
38.	56.890,00m2	0 Rt.0, Cabang Bungin	7.395.700.000,00
39.	1.891,00m2	Jl. AUP Rt.RT.11 / RW, Pasar Minggu	4.349.300.000,00
40.	2.579,00m2	AUP Rt.011 / 05, Pasar Minggu	5.462.500.000,00
41.	7.626,00m2	AUP Rt.0/0, Pasar Minggu	17.539.800.000,00

Peralatan dan Mesin Rp 479.433.022.958

C.14 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 479.433.022.958 dan Rp 476.606.133.715. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	**Rp**	**476.606.133.715**
Pembelian	Rp	6.192.810.085
Rekalasifikasi masuk	Rp	245.410.000
Transfer masuk	Rp	65.955.000
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(2.506.406.267)
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	954.259.700
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	(11.850.000)
Transfer Keluar	Rp	(2.053.552.180)
Hibah (keluar)	Rp	(162.300.095)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	102.563.000
Saldo per 31 Des 2015	**Rp**	**479.433.022.958**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2015	Rp	(337.296.306.132)
Nilai Buku per 31 Des 2015	**Rp**	**142.136.716.826**

Gedung dan Bangunan Rp 93.562.173.424

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp 93.562.173.424 dan Rp 89.836.515.524.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	**89.836.515.524**
Pembelian	115.455.000
Pengembangan Nilai Aset	383.580.000
Penambahan Saldo Awal	1.639.356.000
Reklasifikasi Masuk	1.421.865.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(106.846.000)
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	423.539.500
Reklasifikasi keluar	(536.500.000)
Pengembangan melalui KDP	953.980.800
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.934.577.600
Transfer keluar	(2.503.350.000)
Saldo per 31 Des 2015	**93.562.173.424**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 23.894.794.346

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 23.894.794.346 dan Rp 24.854.568.022. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	**24.854.568.022**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	223.770.700
Penghentian Aset dari Penggunaan	(527.013.740)
Transfer Keluar	(843.344.636)
Pengembangan Nilai Aset	186.814.000
Saldo per 31 Des 2015	**23.894.794.346**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2015	(5.163.225.472)
Nilai Buku per 31 Des 2015	**18.731.568.874**

Aset Tetap Lainnya Rp 3.876.795.324

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp 3.876.795.324 dan Rp 3.874.995.324.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	**3.874.995.324**
Pembelian	17.250.000
Reklasifikasi keluar	(15.450.000)
Saldo per 31 Des 2015	**3.876.795.324**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2015	(14.900.000)
Nilai Buku per 31 Des 2015	**3.861.895.324**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp (nihil)

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp (nihil) dan Rp 1.934.577.600.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (373.521.155.240)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp (373.521.155.240) dan Rp (334.918.846.373).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan		Akm. Penyusutan		Nilai Buku	
1	Peralatan dan Mesin	Rp	479.740.840.958	Rp	(337.296.306.132)	Rp	142.444.534.826
2	Gedung dan Bangunan	Rp	93.562.173.424	Rp	(31.046.723.636)	Rp	62.515.449.788
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	23.894.794.346	Rp	(5.163.225.472)	Rp	18.731.568.874
4	Aset Tetap Lainnya	Rp	3.876.795.324	Rp	(14.900.000)	Rp	3.861.895.324
Akumulasi Penyusutan		**Rp**	**601.074.604.052**	**Rp**	**(373.521.155.240)**	**Rp**	**227.553.448.812**

Aset Tak Berwujud Rp 1.217.530.216

C.20 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp 1.217.530.216 dan Rp 903.579.269. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	**Rp**	**903.579.269**
Pengembangan Nilai Aset	Rp	116.500.000
Pembelian	Rp	198.675.000
Transfer Masuk	Rp	6.649.185
Transfer Keluar	Rp	(7.873.328)
Saldo per 31 Des 2015	**Rp**	**1.217.530.126**
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 31 Des 2015	**Rp**	**1.217.530.126**

Aset Lain-Lain Rp 62.716.030.432

C.21. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp 62.716.030.432 dan Rp 59.961.289.675. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional, serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	**Rp**	**59.961.289.675**
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp	2.938.157.007
Transfer keluar (BMN yg dihentikan)	Rp	(183.416.250)
Saldo per 31 Des 2015	**Rp**	**62.716.030.432**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(61.625.192.679)
Nilai Buku per 31 Des 2015	**Rp**	**1.090.837.753**

Nilai aset yang telah transfer keluar di tahun 2015 sebesar Rp. 183.416.250, sebagai berikut :

No.	Kd.Satker	Uraian Satker	Nilai Aset	SK.Penghapusan
1.	059458	Diperta. Kab. Mojokerto	Rp. 11.795.000	No.028/2061/1416-113/2015
2.	129076	Diperta. Kab. Lampung Tengah	Rp. 7.300.000	No.800/6292/KPTS /D.3/2.2/2015
3.	199079	Diperta.Kab.Sidrap	Rp.164.321.250	No.520/631/Distan. bun.10 Nov 2014

Untuk Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan baru dapat ditransfer keluar pada Semester I tahun 2016 nanti dikarena SK. Penghapusaan terbit di bulan Pebruari 2016.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp (61.625.192.679)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp (61.625.192.679) dan Rp (59.136.962.023). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
	Software	Rp 1.217.530.216	Rp -	Rp 1.217.530.216
Jumlah		**Rp 1.217.530.216**	**Rp -**	**Rp 1.217.530.216**
B	Aset Lainnya			
	Aset henti guna	Rp 62.716.030.432	Rp (61.625.192.679)	Rp 1.090.837.753
Jumlah		**Rp 62.716.030.432**	**Rp (61.625.192.679)**	**Rp 1.090.837.753**
Total		**Rp 63.933.560.648**	**Rp (61.625.192.679)**	**Rp 2.308.367.969**

Uang Muka dari KPPN Rp 2.634.347.711

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 2.634.347.711 dan Rp 597.385.175. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja. yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 223.104.109

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 223.104.109 dan Rp186.522.982 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan.

URAIAN	31-Des-15	31-Des-14
Belanja barang yg msh hrs dibayar (listrik & Telepon	Rp 209.063.109	Rp 186.521.982
Utang kpd pihak ke tiga/ honor yg blm terbayar	Rp 14.041.000	Rp 1.000
Jumlah	**Rp 223.104.109**	**Rp 186.522.982**

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 6.289.714

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.289.714 dan Rp 0 (nihil), terdapat pada satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara (DK.179066).

Ekuitas Rp 464.417.025.147

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 464.417.025.147 dan Rp 519.070.676.193. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp 5.801.323.869

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 5.801.323.869. dan Rp. 0 (nihil). Pendapatan tersebut terdiri dari:

Jenis Pendapatan	31-Des-15	31 Des 2014	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Pertanian	2.747.957.718	-	-
Pendapatan Penjualan Obat-Obatan	24.145.465		
Pendapatan Penjualan Lainnya	7.312.300	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Ged. & Bang.	83.735.481	-	-
Pendapatan Hak dan Perijinan	9.700.000	-	-
Pendapatan Sensor/Karantina	1.520.582.614	-	-
Pendapatan Jasa Tenaga	1.290.361.031	-	-
Pendapatan Jasa Giro	9.942.873	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	8.291.190	-	-
Pendapatan Bunga Lainnya	1.250.495	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan	82.861.602	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	54.871.800	-	-
Jumlah	**5.841.012.569**	**-**	**-**

Beban Pegawai Rp 44.267.236.536

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 44.267.236.536 dan Rp 0 (nihil). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	31.398.664.220	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	728.746	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.355.710.415	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	681.214.245	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	1.234.600.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	919.948.125	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	788.287.505	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	1.965.345.780	-	-
Beban Uang Makan PNS	3.626.835.000	-	-
Beban Tunj. Lain-Lain	25.852.500	-	-
Beban Tunj. Umum PNS	1.270.050.000	-	-
Jumlah	**44.267.236.536**	**-**	**-**

Beban Persediaan Rp 33.551.406.898

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 33.541.406.898 dan Rp. 0 (nihil). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	22.851.008.645	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	59.441.251	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	965.452.057	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	317.000	-	
Beban Barang Persediaan Lainnya diserahkan kemasyarakat	43.075.000		
Beban Persediaan Bahan Baku	10.183.808.358	-	
Beban Persediaan Lainnya	516.272.895	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**34.619.375.206**	**-**	**-**

Beban Barang dan Jasa Rp 185.043.901.895

D.4 Beban Jasa

Beban jasa 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 185.043.901.895 dan Rp 0 (nihil). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	4.117.884.805	-	-
Beban Penambah daya tahan Tubuh	235.865.500	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	954.323.820	-	-
Beban Honor Operasional Satker	20.588.451.900	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	420.549.200	-	-
Beban Bahan	47.936.171.802	-	-
Beban honor Output kegiatan	81.206.874.020	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10.235.522.973	-	-
Beban Langganan Listrik	2.252.346.823	-	-
Beban Langganan Telepon	212.736.235	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	177.592.400	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	66.612.644	-	-
Beban Jasa Konsultasi	64.474.000		
Beban Sewa	3.027.507.500	-	-
Beban Jasa Profesi	8.800.429.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	4.879.208.664	-	-
Jumlah	**185.176.551.286**	**-**	**-**

Beban Pemeliharaan Rp 8.255.918.285

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 8.255.918.285 dan Rp 0 (Nihil). Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.225.621.625	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	20.000.000		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.275.899.402	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	694.503.950	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	15.000.000	-	-
Jumlah	**7.231.024.977**	**-**	**-**

Beban Perjalanan Dinas Rp 229.457.852.728

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 229.457.852.728 dan Rp 0 (nihil). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	113.840.261.536	-	-
Beban Perjalanan Tetap	24.960.500	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.784.136.412	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota	45.315.760.045	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41.363.223.975	-	-
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	129.510.260	-	-
Jumlah	**229.457.852.728**	**-**	**-**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp 24.706.914.946

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 24.706.914.946 dan Rp 0 (nihil). Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat (KelompokTani), rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.942.988.400	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	16.425.963.175	-	-
Beban Jalan,Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	19.540.000	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	561.777.000	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.713.571.371	-	-
Jumlah	**24.663.839.946**	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp 2.107.489.106.253

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 1.107.489.106.253 dan Rp 0 (nihil). Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat (kelompok tani) yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	2.097.566.703.503	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	9.922.402.750	-	-
Jumlah	**2.107.489.106.253**	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 42.023.635.850

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 42.023.635.850 dan Rp 0 (nihil). Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.376.945.481	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.949.192.745	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	666.964.838	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	30.532.786	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	**42.023.635.850**	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih *Rp 6.616.620*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 6.616.620 dan Rp 0 (nihil). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNBP	2.132.357	-	-
Beban Penyisihan Piutang TPTGR	4.484.263		
Jumlah	**6.616.620**	**-**	**-**

Beban Lain-Lain Rp 0 (nihil)

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 10.585.532.762

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31-Des-15	31 Des 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	10.585.532.762	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**10.585.532.762**	**-**	**-**

Pos-Pos Luar Biasa Rp 0 (nihil)

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Jumlah Beban Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 519.070.676.193

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 519.070.676.193 dan Rp 0 (nihil).

Surplus(defisit) LO Rp (2.656.202.501.552)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar Rp (2.656.202.501.552) dan Rp 0 (nihil). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan Rp (4.992.196.094)

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp (4.992.196.094) dan Rp 0 (nihil), Rincian sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

Koreksi Nilai Aset Tetap Rp 8.007.323.823

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 8.007.323.823 dan Rp 0 (nihil), adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Beban Rp 0 (nihil)

D.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Koreksi Atas Pendapatan Rp 0 (nihil))

D.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp 0 (nihil).

Ekuitas Akhir Rp 468.419.834.854

D.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 468.419.834.854 dan Rp 519.104.620.880